**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Hasil dari penghitungan uji koefisien determinasi (*AdjustedR2*) sebesar sebesar 0,989. Hal ini berarti 98,9% variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal, sedangkan 1,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menggali lagi sumber penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara mengintensifkan penerimaan pajak dan menciptakan sumber penerimaan baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. Dengan demikian daerah akan mampu melaksanakan segala urusan pemerintahannya dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.
2. Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah perlu dipisahkan antara yang digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan infrastruktur agar DAU tidak hanya digunakan pemerintah daerah untuk belanja pegawai.
3. Transfer pusat seharusnya lebih menekankan pada dana alokasi khusus karena dampaknya secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur daerah dibandingkan meningkatkan dana alokasi umum yang dialokasikan untuk belanja pegawai.
4. Bagi Pemerintah Daerah sebaiknya dalam APBD lebih memprioritaskan belanja modal dengan cara menghemat belanja pegawai dan belanja barang/jasa, upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan memberi dorongan pada sektor ekonomi daerah.